

1.4. Media and Local Wisdom

MEDIA CONTRIBUTION IN THE FULFILLMENT OF RELIGIOUS NEEDS FOR PROSTITUTE COMMUNITY IN LORONG INDAH COMPLEX PATI

Fatma Laili Khoirunnida, Zaimatus Sa'diyah, Retno Susilowati, Irzum Farihah
zaimah.afnan@gmail.com

This article aims to see prostitution as a social phenomenon still unable to separate from privacy rights including the right to achieve meaningful life for prostitute community as religious beings who are aware of the binding of religious rules. This study used a qualitative approach with data collection techniques through observation, interview and documentation. Informants in this study are prostitute community in Lorong Indah complex Pati, religious leaders and the surrounding community. The results of research show that during the process of searching of meaningful life, the existence of religious needs remains the latent side behind the vulgar look of commercialization of their bodies. Diversity behind religious needs engender different pattern of fulfillment for these religious needs. The existence of media such as television, radio and also print media (newspaper) has an important role to fulfill the religious needs of prostitute community in Lorong Indah Pati.

Keywords: Meaningful life, prostitute community, religion, media

SARAKOPAT: PEACEFUL EDUCATION FOR GAYO'S SOSIAL CONFLICT BASED ON LOCAL WISDOM

Eliyyil Akbar
STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh, elayakbar@yahoo.co.id

Until recently, the term conflict has generated a lengthy discussion, for it contains a controversial element. In the debate are polarized views on conflict: some regard it as a serious problem; some regard it as a minor one; some take a moderate view between the two. However, conflicts left without any problem solving tend to refer to patterns of violence or threats. Similarly, people of Gayo, a multicultural society, are often in a rift among each other due to a sense of chauvinism (people's loving their own tribes in an excessive way). A conflict is unlikely to be resolved by the people involved in it. Herein, they are in a great need of conflict management aimed at limiting escalation and the tendency of violence to a stability. To serve this purpose, the reconstruction of local wisdom is one of the peace efforts preserving the ancestral tradition, that is, the high tolerance for divergence to ease the conflict situation and take effective control of it. The traditional method to adopt in solving the problem is applying Sarakopat, which is a government system run by elements including Reje, Imem, Petue and RGM (Rakyat Genap Mufakat). The purpose of this paper is to explore how the peace education program conducted by establishing Sarakopat in dealing with social problems of Gayo and how the moral, spiritual values of Sarakopat help people avoid conflict and keep the peace in their social life

Keywords: Sarakopat, Local Wisdom, Peaceful Education

PENDAHULUAN

Secara faktual, keanekaragaman merupakan ciri dari suatu masyarakat Indonesia. Sifat manusia yang statis dan dinamis dapat dimiliki oleh makhluk yang berpendidikan. Saat statis, manusia terdiam dari satu titik tanpa bergerak ke titik yang lain sehingga kurang berkompetensi dengan yang lain. Saat dinamis, manusia mampu mencapai apa yang hanya bisa dipandang oleh makhluk berkondisi statis. Kondisi tersebut bahkan terjadi dalam sekumpulan masyarakat, sehingga timbul iri, dengki, saling hasud dan dapat memicu timbulnya konflik. Padahal manusia adalah makhluk Tuhan yang dinamis, makhluk Tuhan yang berkembang, makhluk Tuhan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari antara individu dalam kelompok kecil dan besar. Bila konflik adalah konflik pribadi, berarti memiliki konflik dengan dirinya sendiri dan dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki dilema. Konflik antar anggota kelompok, di antara konflik interpersonal yang paling sering terjadi adalah konflik pasangan, ada juga konflik antara berbagai jenis organisasi, misalnya di kalangan industri, kelompok kepentingan dan institusi pemerintah, dan tentu saja di antara negara-negara. Konflik di Indonesia pada kenyataannya, sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi atau kecemburuan sosial ketika memandang masyarakat yang dinamis. Kecemburuan tersebut dibungkus rapat sebagai alasan penyebab kemarahan adanya perbedaan status sosial karena unsur malu yang diasumsikan khalayak umum.

Konflik yang tiada ujung pangkal *solving* dapat menghasilkan diskusi yang panjang, karena mengandung unsur kontroversial. Tidak sedikit yang memandang bahwa alasan kecemburuan merupakan problem kecil, nyatanya dari hal kecil yang justru menarik pada sesuatu yang besar. konflik yang ditinggalkan tanpa *problem solving* cenderung mengacu pada pola kekerasan atau ancaman. Ancaman tersebut disadari bahwa masalah tersebut merupakan masalah serius. Dalam debat tersebut ada pandangan terstruktur mengenai konflik yaitu beberapa menganggapnya sebagai masalah serius; beberapa menganggapnya sebagai yang kecil; beberapa mengambil pandangan moderat di antara keduanya.

Kasus yang terjadi pada masyarakat Gayo sebagai masyarakat yang multikultural, sering mengalami keretakan antara satu sama lain karena rasa *chauvinisme* (orang mencintai suku mereka sendiri dengan cara yang berlebihan). Permasalahan tersebut berawal ketika rencana pembangunan proyek kertas di Gayo tahun 1960 di daerah Kebayakan. Tahun 1962 pembangunan proyek ini hanya menjadi dongeng karena secara tiba-tiba terhenti tanpa alasan yang jelas. Masalah pembangunan tersebut menjadikan masyarakat Gayo terpecah belah menjadi dua yaitu pihak Toa dan pihak Uken, perpecahan tersebut masih mentradisi sampai

sekarang namun hal tersebut terhindarkan melalui kearifan lokal yaitu memfungsikan sistem pemerintahan (*sarakopat*),⁵⁶karena konflik tidak dapat dipecahkan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Wujud kearifan lokal masyarakat Gayo meliputi bahasa Gayo, sistem tata kelola pemerintahan (*sarakopat*), norma bermasyarakat (*sumang*), ekspresi estetik (*didong*), konsep nilai dasar budaya Gayo.⁵⁷Adapun penulisan ini penulis ambil mengenai sistem tata kelola pemerintahan (*sarakopat*).Tidak dapat dipungkiri, bahwa kearifan lokal sekarang ini mulai terkikis. Misalnya, disfungsi *sarakopat* yang merupakan salah satu sistem tata kelola pemerintahan yang sudah berkembang sejak lama dan menjadi identitas masyarakat suku Gayo. Pergeseran tersebut seperti tindakan hakim sendiri saat ada problem masyarakat. Hanya beberapa daerah yang masih memfungsikan *sarakopat*. Bagi masyarakat mayoritas Islam, paradigmanya bahwa budaya itu terlepas dari agama dan agama bukan produk budaya. Walau budaya terlepas dari agama namun agama dan adat laksana sifat dan dzat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana program pendidikan perdamaian dilakukan dengan membangun Sarakopat dalam menangani masalah sosial Gayo dan bagaimana nilai-nilai spiritual *Sarakopat* dalam membantu menghindari konflik dan menjaga perdamaian dalam kehidupan sosial mereka

METODE PENULISAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Subjek dalam penelitian ini adalah *Sarakopat* dan ahli adat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap Pengolahan dan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi.

KEARIFAN LOKAL

Berbicara tentang kearifan lokal, biasanya mengacu pada masyarakat adat dan pengetahuan tertentu masyarakat tersebut. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan lokal yang unik untuk masyarakat tertentu yang berasal dari akumulasi pengalaman, eksperimen informal dan pemahaman yang mendalam dan berkembang dari pengalaman bertahun-tahun. Sumber pengetahuan asli berasal dari nenek moyang yang dimodifikasi melalui akumulasi

⁵⁶ Sistem pemerintahan masyarakat Gayo

⁵⁷ Al-Musanna>, "Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal Sebagai Basis Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 6 (November, 2011),593.

pengalaman praktis serta diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, kearifan lokal adalah pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat setempat melalui akumulasi pengalaman dan terintegrasi dengan pemahaman seputar alam dan budaya yang kemudian termanifestasi dalam bentuk sikap dan perilaku

Kearifan lokal sering dikaitkan sebagai perilaku manusia yang positif dalam menghadapi alam dan lingkungan sekitarnya dan bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, nasehat nenek moyang atau budaya yang dibangun secara ilmiah dalam sebuah komunitas manusia. Kearifan lokal bisa jadi dipahami sebagai ide lokal yang bijak, penuh hikmat, dan bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.⁵⁸ Masyarakat yang memiliki budaya sendiri, adalah masyarakat miniatur dengan sistem produksi, pengelolaan sumber daya, sistem kesehatan, sistem pengetahuan dan pembelajaran, sistem peradilan, pemerintahan sendiri, dan sistem ekonomi yang dijalankan oleh masing-masing keluarga dan masyarakat.⁵⁹ Selain itu, pengetahuan lokal didefinisikan sebagai 1) pengetahuan yang terkait dengan tempat, dan satu set pengalaman, dan dikembangkan oleh masyarakat setempat; 2) pengetahuan yang didapat melalui tiruandan bereksperimen; 3) pengetahuan praktis sehari-hari didapat dari trial and error; 4) pengetahuan empiris yang tidak teoritis; 5) pengetahuan yang komprehensif dan terpadu dalam ranah tradisi dan budaya.⁶⁰

Budaya adalah “*culture is a system of lifeways, ways of behaving, ways of thinking, ways of believing, and ways of relating to others*” (sebuah sistem tentang cara hidup, cara berperilaku, cara berpikir, cara mempercayai, dan cara berhubungan dengan orang lain). Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa budaya yang menentukan bagaimana cara orang dalam bertindak atau berperilaku, di mana salah satu unsur pembentuk budaya tersebut adalah nilai-nilai (values).⁶¹ Nilai budaya merupakan tonggak karakter bangsa yang penting untuk diinvestasikan pada masing-masing individu, sehingga setiap individu mampu lebih memahami, menafsirkan, dan menghargai serta menyadari pentingnya nilai budaya dalam melakukan apapun. aktivitas hidup. Pelestarian budaya lokal dan pengembangan budaya

⁵⁸ Murni Rachmawati, Andy Mappajaya, Local Wisdom In Java's Architecture Studies in Nature, Technology and Humanity, *Academic Research International*, Vol.3 No.1, 2012, hal. 450

⁵⁹ Miss Roikwanphut Mungmachon, Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure, *International of Humanities and Social Science*, Vol.2 No.1, hal. 175

⁶⁰ Dahliani, Ispurwono Soemarno, Purwanita Setijanti, Local Wisdom in Built Environment In Globalization Era, *International Journal Of Education and Research*, Vol.3 No.6, 2015, hal.159

⁶¹ Siti Syamsiyatun, Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika dan Kearifan Lokal: Untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*, (Geneva: Globethics, 2013), hal.208.

nasional melalui pendidikan baik formal maupun informal, untuk mengaktifkan kembali semua wadah dan kegiatan pendidikan.⁶²

SARAKOPAT

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan. Sistem selalu berkaitan dengan mekanisme dan cara kerja suatu lembaga, institusi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.⁶³ Jadi, sistem yang dimaksud dari sistem pemerintahan ini adalah mekanisme suatu aparat dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Sejarah menunjukkan bahwa masing-masing daerah memiliki kearifan lokal sendiri yang munculnya melalui proses yang panjang sehingga akhirnya terbukti bahwa hal tersebut mengandung kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Gayo memiliki nilai budaya yang tertinggi yaitu *mukemel* merupakan harga diri yang selalu dijaga oleh individu. Menurut Melalatoa, nilai utama pada budaya Gayo adalah harga diri dan untuk mencapainya dengan mengamalkan pada nilai penunjang, yaitu *tertib, setie, semayang-gemasih, munentu, amanah, genap-mupakat*, dan *alang-tulung*. (sikap kompetitif dalam mengamalkan nilai penunjang).⁶⁴ Untuk memelihara nilai dan melaksanakan norma adat Gayo dibentuk pemerintahan adat Gayo dengan stuktur organisasi yang terdiri dari seperangkat aparat yang melaksanakan pemerintahan secara terpadu yang disebut *Sarak Opat* yaitu empat unsur pemerintahan yang berkewajiban memelihara kehormatan wilayah dan warga.⁶⁵

Adanya *sarak opat* mengacu kepada surat keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Aceh Tengah, 5 Maret 1992 No.045/12/SK/92 Tentang Lembaga Adat Gayo di kabupaten Aceh Tengah pasal 4 “*sarak opat* dibentuk pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan”.⁶⁶ Unsur *sarak opat* terdiri dari *Reje* atau raja yaitu pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam suatu wilayah tertentu. Fungsi *Reje* ialah memimpin, mengkoordinir dan menegakkan

⁶²Erman Syarif, Hasriyanti, Ach. Fatchan, Komang Astina, Sumarmi, Conservation Values of Local Wisdom Traditional Ceremony *Rambu Solo* Toraja's Tribe South Sulawesi as Efforts the Establishment of Character Education, *EFL Journal*, Vol.1 No.1, 2016, hal. 18

⁶³ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grafindo, 2008), hal. 26.

⁶⁴ M. Junus Melalatoa, *Didong Pentas Kreativitas Gayo*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 204

⁶⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, hal 146

⁶⁶Mahmud Ibrahim-Hakim Aman Pinan *Syariah Dan Adat Istiadat jilid 1* (Takengon, Yayasan maqamam Mahmuda 2002)126

keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Fungsi tersebut diungkapkan dalam bahasa adat “*Reje musuket sipet*” yaitu pemimpin berkewajiban menyukat dan menyipat, atau dengan kata lain bahwa seorang pemimpin menegakkan keadilan dengan kepintaran dan kebijakannya.

Unsur kedua dari *sarak opat* adalah *Imem*, *Imem* yaitu yang dipilih rakyat untuk memimpin pelaksanaan apa yang menjadi kewajiban yang dianjurkan syariat serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan maupun dimakruhkan. Fungsi *Imem* dalam adat disebut “*Imem muperlu sunet*” yaitu mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan dan disunahkan oleh syariat. Unsur ketiga dari *sarak opat* ialah *Petue*, yaitu orang tua yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya yang dipilih oleh rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi rakyat. hasil dari perencanaan dan evaluasi maupun saran pemecahan masalah disampaikan oleh *Petue* kepada *Reje*, *Imem* dan *Rakyat*.

Fungsi *Petue* dalam adat ialah “*Petue musidik sasat*” yaitu menyelidiki, meneliti masalah yang dihadapi rakyat dan merencanakan pembangunan. Unsur keempat dari *sarak opat* adalah RGM (*Rakyat Genap Mupakat*). Rakyat adalah wakil-wakil yang diplih oleh rakyat terdiri dari potensi masyarakat baik orang tua maupun pemuda, laki-laki dan perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskan dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembagunan sesuai kepentingan rakyat. fungsi RGM (*Rakyat Genap Mupakat*) adalah wakil yang bermusyawarah secara mufakat bulat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menyangkut kepentingan kemajuan rakyat. peran *sarak opat* adalah sebagai hakim adat dan sebagai juru penengah dalam setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Sarak opat merupakan suatu sistem hukum adat. Hukum adat bersumber dan berlandaskan hukum Islam. Antara agama dan adat dijalankan secara serasi dan terpadu untuk mewujudkan *agama ibarat empus*, *edet ibarat peger* (agama Islam seperti kebun atau tanaman, adat seperti pagar agar tanaman berhasi). Sistem pemerintahan *sarak opat* dilakukan dengan berpegang teguh atas *keramat mufakat*, *behu mudedele*, *sepapah sepupu sebegi seperange*, *ike mowen sara tamunen*, *ike beluh sara loloten*. Maksudnya, suatu kemuliaan ditentukan karena sebuah mufakat, suatu keberanian dapat diwujudkan karena suatu kebersamaan, sependapat dan satu gerak dalam melaksanakannya, kalau bersama-sama dalam satu tempat maka semua berjamaah dan jika pergi bersama dengan menempuh satu jalan.⁶⁷ Sebagaimana yang

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Yusin, pada tanggal 22 Juni 2017

diungkapkan Bapak Petue bahwa pemerintah dibuat untuk keamanan hidup masyarakat, peraturan yang dibuat bukan untuk menyusahkan dan pelaksana penegak pemerintah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁶⁸

Pelaksanaan *sarak opat* tidak terlepas dari sumber adat dan berlandaskan hukum Islam. Hukum adat mempunyai sifat tidak tertulis. Tetapi hukum Islam adalah sifat normatif dan teksual yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Jadi meskipun hukum adat tidak tertulis, namun sumber landasanya adalah hukum tertulis yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Suatu keputusan terkait hukum adat yang berlawanan dengan hukum Islam, maka solusinya, setelah mendengarkan pendapat Imam, hukum adat dikesampingkan dan hukum Islam yang dilaksanakan. Anantara hukum adat dan hukum Islam, secara praktik kehidupan lebih kuat hukum Islam. Hubungan antara kedua hukum adat dan hukum agama ini adalah saling berjalanan yang sangat erat, sebagaimana dilukiskan dalam kata-kata adat Gayo "*hukum ikandung edet, edet ikandung Agama*". Artinya setiap hukum mengandung adat, dan setiap adat mengandung agama. Hukum adat adalah agama. Dengan kata lain, hukum adat di dalam pemerintah Tanah Gayo pada hakikatnya adalah "pancaran dari hukum Islam"⁶⁹

PENDIDIKAN DAMAI

Pendidikan berasal dari kata "didik" dalam bahasa Inggris "*educate, bring up, raise*", pendidik disebut "*educator*" dan pendidikan disebut "*education*".⁷⁰ Sedangkan dalam bahasa Arab, didik atau mendidik disebut *rabbā-yurabbî*, pendidik disebut *murabbî*, dan pendidikan disebut *tarbiyah*.⁷¹ Selain itu makna pendidikan dalam al-Qur'an sangat beragam seperti *ta'lim* (pengajaran), *tadrîs* (pembelajaran), dan *ta'dîb* (penanaman budi pekerti). Istilah dalam pendidikan yang sering digunakan yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogy yang berarti ilmu pendidikan. Secara umum makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan.⁷²

Perdamaian bukan hanya masuk dalam istilah pasca perang. Perdamaian menunjukkan harmonisasi tanpa pertengkaran. Dalam masyarakat yang damai dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik, berkembang secara moral, saling memperlakukan dengan adil, memenuhi kebutuhan dasar, dan saling menghormati satu sama lain. Intinya, masyarakat hidup

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Petue kampung Keramat Mufakat, tanggal 28 Juni 2017

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Mahmud Ibrahim pada tanggal 15 Juni 2017.

⁷⁰John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal.144.

⁷¹KH. Adib Bisri & KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, hal.62-63.

⁷²Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.1-2.

dalam kesatuan. Perdamaian yang terjadi di dalam individu dapat dilihat dari kedamaian batin dengan memperkuat hubungan kepada Khaliq. Perdamaian batin melibatkan ketenangan pikiran dan tidak adanya rasa takut. Kedamaian lahir adalah perdamaian di masyarakat.⁷³ Fokus perdamaian ini adalah mewujudkan kedamaian lahir batin yang menyeluruh yang memiliki dimensi spiritual dan material.

Perdamaian adalah kebijakan jangka panjang yang perlu dipikirkan. Sebagian besar mengatakan bahwa ketikamenghentikan penggunaan senjata, itulah kedamaian. Tapi, berbeda dalam perihal pendidikan dalam mempromosikan perdamaian dibutuhkan banyak hal untuk menghentikan diskriminasi di masyarakat sehingga menjadi dinamika harmoni sosial.⁷⁴ Pendidikan perdamaian merupakan bagian integral dari visi UNICEF tentang kualitas dasarpendidikan. Deklarasi Dunia 1990 tentang Pendidikan menyatakan bahwa kebutuhan dasar belajar tidak hanya seperti melek huruf dan berhitung, tapi juga pengetahuan, keterampilan, sikap dannilai yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja dalam harga diri dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendidikan bukan hanya untuk tumbuh dan mengembangkan semua aspek kemanusiaan tanpa terikat dengan nilai, tapi nilai sebagai pengikat dan memberi pengaruh proses pertumbuhan dan perkembangan ini". Nilai dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Pendidikan lebih cenderung dijadikan sebagai wahana transfer pengetahuan dan nilai setidaknya mengarah pada unsur intelektual kebenaran. Untuk menyeimbangkan kebutuhan moral dan intelektual, pendidikan membutuhkan nilai sebagai implementasi. Penulisan ini lebih mengedepankan pendidikan yang mempunyai nilai damai sehingga tercover proses dan nilai dalam sistem pemerintahan *sarakopat*.

Sejak tahun 1990, sejumlah dokumen UNICEF telah mengkonfirmasi visi pendidikan sebagai proses yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikapnilai yang dibutuhkan untuk hidup damai di dunia. Pendidikan dan pembelajaran merupakan proses yang membantu membentuk modal manusia baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun modal sosialuntuk toleransi, menghormati orang lain dan hak setiap individu untuk berpartisipasi kesetaraan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan ekonomi serta untuk menantangbudaya kekerasan yang mengancam untuk menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat di banyak negaranegara.⁷⁵

⁷³Maiyo K. Julius, Gladys Ngao, Mulwa David and Mugambi Paul, Peace Education for Sustainable Peace and Development: A Case of Kenya, *Journal of Research in Peace, Gender and Developmen*, Vol.2, 2012, hal.029

⁷⁴Kendra Dupuy, *Education For Peace: Building Peace and Transforming Armed Conflict Through Education Systems*, (Oslo: International Peace Research Institute, tt), hal. 25

⁷⁵Susan Fountain, *Peace Education In UNICEF*, (New York: unicef, 1999), hal.1.

Makna perdamaian bisa menjadi negatif dan positif. Perdamaian yang negatif mensyaratkan tidak adanya kekerasan dan konflik langsung namun karena kekerasan struktural yang mencakup keadaan yang membatasi kehidupan, kesehatan, kebebasan pribadi dan pemenuhan diri sendiri. Hal itu terjadi adanya kekurangan kebutuhan dasar individu yang memicu sikap eksploitasi atau menindas orang lain, dan standar keadilan tidak ditegakkan. Perdamaian yang positif adalah perdamaian yang berkelanjutan, karena mengandung adanya ketidakadilan sosial dalam bentuk kekurangan ekonomi, kelalaian sosial, dan ketidakadilan ras yang memberikan penindasan seperti kejahatan. Pendidikan perdamaian memiliki lima dalil utama yaitu menjelaskan akar kekerasan, mengajarkan alternatif kekerasan, menyesuaikan berbagai bentuk kekerasan, perdamaian itu sendiri adalah proses yang bervariasi sesuai konteks dan konflik ada dimana-mana.⁷⁶

LOCAL WISDOM SARAKOPAT SEBAGAI PENDIDIKAN YANG MENDAMAIKAN

Pendidikan damai yang dimaksud adalah proses berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia sehingga untuk menciptakan keteraturan hidup. Pendidikan damai merupakan aktualisasi dari penegakan syariat Islam yang diberlakukan pada masyarakat Gayo. Penegakkan tersebut dilakukan untuk menuju keharmonisan dengan menghidupkan suasana masyarakat cinta damai. Kerukunan yang diwujudkan tentu tidak terlepas dari suatu problema, namun kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Gayo yang melibatkan sistem pemerintahan (*sarakopat*). Sistem pemerintahan tersebut menyimpan nilai Islami yang bertujuan agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai realitas akan kehidupan para Nabi> dengan melakukan musyawarah. Sebagaimana dalam surah ‘Ali ‘Imran ayat 103 yang artinya: *“Dan berpeganglah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan ni’mah Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena ni’mah Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”* (QS. ‘Ali> ‘Imra>n :103.)⁷⁷ Nilai Islam yang diterapkan pada sistem pemerintahan menghasilkan mufakat yang menumbuhkan solidaritas serta toleransi.

Kerukunan pada masyarakat dataran tinggi Tanoh Gayo terwujud dalam praktik keseharian walaupun masalah sukuisme masih nampak, namun dapat terselesaikan dengan

⁷⁶Ian M. Harris, Peace Education Theory, *Journal of Peace Education*, Vo.1 No.1, 2004, hal.6

⁷⁷ QS. ‘Ali> ‘Imra>n :103.

adanya sistem *sarakopat*. Kehidupan yang serba tidak sama membaaur menjadi satu, hal tersebut mensiratkan bahwa perbedaan agama atau suku merupakan hal yang faktual. Masyarakat Gayo yang berada di *Toa* dan *Uken* pecah karena masalah pembangunan. Pendidikan yang diperoleh dari *problem solving* melalui *sarakopat* merupakan satu kesatuan yang utuh diharapkan untuk tidak memilah-milah antara pihak *Toa* maupun pihak *Uken* dan tidak saling berpecah belah walaupun nafas sukuisme masih berhembus dengan simbol rumah adat yang dimiliki Gayo bernama *umah pitu ruang* (rumah satu untuk kesatuan).

Kehidupan masyarakat Gayo yang masih kuat memegang nilai budaya dalam bidang agama, kesejahteraan, pendidikan, kesatuan dan persatuan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Penyongkong maju mundurnya segala permasalahan terletak pada urat nadi *reje* yang merupakan salah satu unsur *sarakopat*. Selain *reje*, unsur *sarak opat* adalah *petue* yang bertugas meneliti dengan cermat kondisi masyarakat, mana yang membutuhkan dan mana yang masyarakat yang berada, tanpa membanding-bandingkan perbedaan agama dan suku. Fokus agama lebih dipercayakan kepada *Imem* seperti menangani akidah, pendidikan, aqad nikah, Khitan, mendirikan mushola, membangun masjid, dan lain sebagainya. Unsur *sarakopat* ketiga adalah *Rakyat Genap Mupakat*, *Rakyat* adalah rakyat sedangkan *Genap Mupakat* yaitu musyawarah memecahkan berbagai persoalan secara bersama-sama. Dengan musyawarah dapat menjelaskan semua akar permasalahan secara jelas. Komunikasi informal dapat digunakan untuk mengatasi peningkatan kesadaran isu perdamaian dan konflik, membangun proses damai, dan merubah perilaku.⁷⁸ Struktur akar musyawarah tersebut bermakna pokok “*menampakkan dan menawarkan sesuatu*” dan “*mengambil sesuatu*” dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syawartu fulana fi amri*: “aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku”.⁷⁹ Tanpa *Genap Mupakat*, *sarakopat* tidak bertindak membenarkan dan merestui kegiatan, khususnya jika dipandang merugikan kesatuan dan persatuan.

Dalam melaksanakan proses musyawarah dalam sebuah kasus, *Reje* selaku pemimpin wilayah mengumpulkan tiga *sarak opat* lain beserta beberapa saksi saat ketidakrukunan terjadi, dalam musyawarah dihadirkan pula terdakwa (orang yang melakukan kesalahan) kemudian dilakukan proses penyelidikan sebab terjadinya masalah tersebut, ketika didapati inti masalah para *reje* selaku pimpinan memintai pendapat rakyat dan hasil investigasi lapangan yang dilakukan *petue*. Ketika menemukan hasil keputusan akan ditanyai kepada *Imem* apakah keputusan tersebut melanggar adat maupun hukum agama, jika tidak *Reje* akan memberikan

⁷⁸Susan Fountain, *Peace Education In UNICEF*, (New York: unicef, 1999), hal.22

⁷⁹ Lajannah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009), hal.220-221

keputusan yang telah disepakati. Keputusan tersebut bukan berada pada *reje* namun secara musyawarah sesuai nilai adat Gayo *genap-mupakat*. *Genap Mupakat* merupakan bentuk demokrasi. Pemutusan perkara rakyat berpegang teguh pada bahasa adat “*keramat mupakat behu berdedele*” yaitu bertanggung jawab bersama-sama. kebersamaan tersebut yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut sebagaimana dengan ungkapan bahwa dialog adalah alternatif utama yang dapat digunakan untuk mencegah kebencian agama dan ekstrimisme agama. Adanya refleksi dipandang sebagai aspek penting dari kompetensi sosial untuk itu meningkatkan kualitas partisipasi dan komunikasi.⁸⁰ Aktualisasi *sarakopat* yang bertujuan membawa persatuan dan kesatuan menciptakan suasana damai, tentram, dan rukun. Hasil akhir dalam keputusan mengajarkan untuk menjadi damai dan menghindari perpecahan.

Untuk menjaga kerukunan masyarakat Gayo tidak langsung diucapkan namun dengan menggunakan bahasa kiasan untuk menghindari perpecahan. Sebagaimana dalam istilah bahasa Gayo “*bengkuang gewat, tengkahe gep lukee dekat*” (sesuatu larangan, pernyataan, nasehat, teguran, dilakukan melalui bahasa kias). Seperti yang dijelaskan bapak Yusin, bahwa contoh bahasa kiasan untuk menasehati seseorang adalah: “*arih-arih kati selamat mukekarat udah gere selalu*” (biarlah lambat asal selamat). Bahasa kiasan untuk melarang melakukan hal-hal yang menyebabkan perpecahan, adalah: “*enti lagu tajuk dilem, ke jerohpe reta pinyem*” (jangan seperti bunga dilam, walaupun harum serba wangi, tetapi harta pinjam atau racak di labo). Masih banyak bahasa lain yang digunakan. Selain bahasa, sikap atau moral yang dilakukan masyarakat Gayo adalah melakukan hakiki budaya seperti: “*tertib, setie, semayang-gemasih, munentu, amanah, genap mupakat, dan alang-tulung*”. Perdamaian yang dilakukan masyarakat Gayo, saling menghormati antara satu dengan lainnya dapat digambarkan dengan ketidakberatan menghadiri undangan, bekerjasama dan tolong-menolong antar masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Liasta bahwa masyarakat nonmuslim saling menghargai terhadap ibadah umat Islam seperti memberi kesempatan untuk melakukan sholat saat bekerja dan ketika memasuki waktu sholat Jum’at para pedagang nonmuslim menutup toko-toko miliknya.⁸¹ Indikator perdamaian lainnya yang penting adalah sikap toleransi antar beragama. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Pandangan hidup masyarakat Gayo sangat dipengaruhi oleh budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Agama Islam mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan menghilangkan dendam, nilai ini kemudian berpengaruh kepada adat dan budaya. Pandangan

⁸⁰Irene Andersson, Helle Hinge, Claudia Messina, *Peace Education*, (London: CiCe Guidelines, 2011), hal.5

⁸¹Wawancara dengan Bapak Liasta Pranata Taringan (Masyarakat Non Muslim) pada tanggal 17 Juli 2017.

hidup tersebut mendasari bagaimana masyarakat Gayo dalam hubungan dengan orang lain. Pandangan bahwa manusia terikat pada pihak-pihak lain melahirkan sikap untuk saling mendukung satu sama lain. Sikap saling dukung diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghormati, bekerjasama, dan menghargai orang lain yang semuanya itu terwujud dalam perilaku kesopanan secara adat.

Setiap perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat selalu diselesaikan dengan *dame* atau *bedame* (damai) yaitu cara penyelesaian tertinggi dan termulia menurut syariat dan adat Gayo, sepanjang masalah yang didamaikan itu bukan bersifat kejahatan berat seperti dengan sengaja berencana membunuh, mencuri, merampok. Hal tersebut sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat : 10 Artinya; “*sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. Prinsip yang terkandung dalam aktualisasi perdamaian adalah *si beret I ringenen, si kul I kucaken, I ke kule enti ne dokopi, narue pe ere I seta-I* maksudnya adalah yang berat diringankan, yang besar diperkecil, besar dan panjang tidak perlu diukur kembali, yang semua tujuannya untuk saling memaafkan.

Masyarakat Gayo melestarikan pemerintahan *sarak opat* untuk melaksanakan otonomi asli kampung. Masyarakat menghendaki agar pemerintah kampung melaksanakan musyawarah untuk menetapkan peraturan dan program pembangunan kampung, melaksanakan syariat dan adat istiadat, menyelesaikan atau mendamaikan perkara, memelihara dan menertibkan keamanan. Menjadikan harapan menuju kenyataan, dibutuhkan *action* yang intens, yaitu peningkatan sumber daya manusia, manajerial dan kesejahteraan personel *sarak opat*. Khusus dalam konteks keagamaan, perdamaian antar umat beragama biasanya muncul ketika agama diaktualisasikan dalam tradisi-tradisi keagamaan dalam bentuk ritual dan perayaan keagamaan. Mencapai kehidupan yang damai diperlukan beberapa unsur, antara lain: *channels of communication, institution, integrative, climate, peace leadership, dan just structure*.⁸² Tidak semua unsur harus eksis dan tampil secara maksimal dalam masyarakat, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat sulit diterapkan dalam masyarakat, apalagi dalam lingkup yang sangat sempit. Asumsi tersebut didasarkan pula pada pemikiran bahwa ketika masyarakat memiliki salah satu atau beberapa unsur dari konstruksi perdamaian tersebut sudah kuat dan menjadi dasar dalam cara pandang masyarakat dalam bersikap dan berperilaku, maka keharmonisan adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat.

⁸² Reyhler, Luc, *Challenges of peace Research*, International Journal Of Peace Studies, Vol. 11, No. 1: Spring/Summer, 2006) hal. 6

KESIMPULAN

Program pendidikan perdamaian dilakukan dengan membangun Sarakopat dalam menangani masalah sosial Gayo adalah dengan pendidikan musyawarah yang menjelaskan akar permasalahan, mengajarkan alternatif kerukunan, memberi *punishments* sesuai mufakat. Nilai-nilai spiritual *Sarakopat* dalam membantu menghindari konflik dan menjaga perdamaian dalam kehidupan sosial mereka yaitu nilai kebersamaan, kesetaraan, kesamaan dan penghargaan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grafindo, 2008
- Al-Musanna>, “Rasionalitas dan Aktualitas Kearifan Lokal Sebagai Basis Pendidikan Karakter”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 6, November, 2011.
- Dahlioni, Ispurwono Soemarno, Purwanita Setijanti, Local Wisdom in Built Environment In Globalization Era, *International Journal Of Education and Research*, Vol.3 No.6, 2015.
- Erman Syarif, Hasriyanti, Ach. Fatchan, Komang Astina, Sumarmi, Conservation Values of Local Wisdom Traditional Ceremony *Rambu Solo* Toraja’s Tribe South Sulawesi as Efforts the Establishment of Character Education, *EFL Journal*, Vol.1 No.1, 2016.
- Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ian M. Harris, Peace Education Theory, *Journal of Peace Education*, Vo.1 No.1, 2004.
- Irene Andersson, Helle Hinge, Claudia Messina, *Peace Education*, London: CiCe Guidelines, 2011.
- Kendra Dupuy, *Education For Peace: Building Peace and Transforming Armed Conflict Through Education Systems*, Oslo: International Peace Research Institute, tt.
- KH. Adib Bisri & KH Munawwir A.Fatah, *Kamus Al-Bisri*.
- Lajannah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009.
- M. Junus Melalatoa, *Didong Pentas Kreativitas Gayo*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Mahmud Ibrahim-Hakim Aman Pinan *Syariah Dan Adat Istiadat jilid 1*, Takengon, Yayasan maqamam Mahmuda 2002.
- Maiyo K. Julius, Gladys Ngao, Mulwa David and Mugambi Paul, Peace Education for Sustainable Peace and Development: A Case of Kenya, *Journal of Research in Peace, Gender and Developmen*, Vol.2, 2012.
- Miss Roikhwaphut Mungmachon, Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure, *International of Humanities and Social Science*, Vol.2.

- Murni Rachmawati, Andy Mappajaya, Local Wisdom In Java's Architecture Studies in Nature, Technology and Humanity, *Academic Research International*, Vol.3 No.1, 2012.
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.
- Reychler, Luc, *Challenges of peace Reaseacrh*, International Joural Of Peace Studies, Vol. 11, No. I: SpringSummer, 2006.
- Siti Syamsiyatun, Nihayatul Wafiroh, *Filsafat, Etika dan Kearifan Lokal: Untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*, Geneva: Globethics, 2013.
- Susan Fountain, *Peace Education In UNICEF*, New York: unicef, 1999.
- John M.Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 2003.